

TABU NIKAH ANTARA MASYARAKAT PURBALINGGA DENGAN SOKARAJA

Sugeng Priyadi
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tabu nikah pada masyarakat perdesaan Purbalingga dan Sokaraja (Banyumas). Penelitian ini ditempuh melalui metode filologi yang dikombinasikan dengan metode folklor. Metode filologi dan folklor dipakai untuk menyediakan sumber sejarah yang terkandung dalam teks dan folklor. Selanjutnya, kedua metode itu ditempuh untuk menghasilkan karya historiografi berupa sejarah kebudayaan atau sejarah intelektual di tingkat lokal Purbalingga dan Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tabu nikah yang terdapat pada masyarakat perdesaan Purbalingga dan Sokaraja menggambarkan fenomena pluralitas sosial budaya yang didasarkan atas legitimasi sosial politik. Tabu nikah yang timbul disebabkan oleh konflik-konflik sosial sebagai bentuk dari persaingan pengaruh dan perang legitimasi antarelite Purbalingga dengan Sokaraja. Dalam konflik tersebut, Raden Kaligenteng menjadi *troublemaker* (*biang kerok*). *Tabu nikah di atas* menunjukkan sesuatu yang dapat dimaknai sebagai gejala pergeseran dari *cosmos menuju chaos*. Namun, *situasi chaos lebih dominan karena pergeseran itu* belum atau tidak melahirkan *cosmos yang baru sehingga selalu dalam posisi* liminal atau ambang. Posisi tersebut bisa dijelaskan dalam rangka *binary opposition yang bersifat relatif yang menghadirkan pihak ketiga yang menempati* posisi liminal.

Kata Kunci : tabu nikah, konflik sosial, persaingan sosial, cosmos, chaos, posisi liminal

ABSTRACT. This study is aimed to discover the marriage taboo in the rural community of Purbalingga and Sokaraja (Banyumas). The study employs the philological method combined with the folklore method. The two later methods are applied to provide the historical sources contained in the texts and folklores. Then, the two methods are taken to produce a historiograph work, i.e. the cultural history or the intellectual history in the local range of Purbalingga and Banyumas. The results of study show that the marriage taboo in the rural community of Purbalingga and Sokaraja indicates the phenomenon of plural socio-culture laid on socio-political legitimate. The marriage taboos are inflicted by social conflicts as the manifestation of social rivalry and legitimate battle. In those conflicts, Raden Kaligenteng is the troublemaker. The marriage taboos indicate something that can be understood as the shift of cosmos into chaos. The chaotic situation is dominant, for the shift has not resulted in a new cosmos, i.e.

it is always in the liminal or threshold position. The position can be clearly seen in terms of realtive binary opposition featuring a third party takes the liminal stand.

Keywords: the marriage taboos, social conflict, social rivalry, cosmos, chaos, and the liminal stand.

PENDAHULUAN

Masyarakat perdesaan di Purbalingga dan Banyumas (Sokaraja) menghasilkan naskah dan folklor yang berkaitan dengan tabu nikah antardesa, antarkecamatan, bahkan antarkabupaten. Folklor tersebut dikaji untuk memahami cara berpikir, bersikap, dan berperilaku manusia Banyumas pada masa lampau. Tabu nikah masih menjadi sistem kepercayaan masyarakat sampai sekarang karena masyarakat tidak berani melanggarnya.

Tulisan ini adalah hasil penelitian tentang tabu nikah yang terjadi antarelite Purbalingga dan Sokaraja pada masa peralihan Banyumas sebagai daerah mancanegara barat Kasunanan Surakarta menjadi wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda pada sepertiga pertama abad ke-19. Ketika peresmian pembentukan Karesidenan Banyumas oleh Belanda pada tanggal 22 Agustus 1831, Sokaraja yang tadinya wilayah kabupaten Banyumas dimasukkan ke dalam wilayah kabupaten Purbalingga (Brotodiredjo & Ngatidjo Darmosuwondo 1969: 75). Sokaraja turun statusnya dari Katumenggungan Sokaraja (wedana bupati Kanoman) menjadi distrik Sokaraja. Katumenggungan Sokaraja berarti hanya berumur setahun lebih dua bulan, satu hari (21 Juni 1830 sampai dengan 22 Agustus 1831) (Soedarmadji 1991: 46-51). Turunnya status tersebut sangat tidak mengenakan bagi Sokaraja karena pejabat baru Mas Kertodirejo (keturunan wedana bupati Kanoman Banyumas) hanya menduduki jabatannya sejak 21 November 1830 hingga 22 Agustus 1831. Kiranya, terjadi konflik antarelite Sokaraja dengan Purbalingga yang digambarkan oleh *Babad Purbalingga-Sokaraja* serta folklor yang berkembang di masyarakat luas. Konflik itu diredakan dengan dikembalikannya Sokaraja ke dalam wilayah kabupaten Banyumas pada tahun 1834 (Brotodiredjo & Ngatidjo Darmosuwondo 1969: 77).

Konflik Purbalingga dan Sokaraja atau dalam cakupan yang lebih luas, yaitu Purbalingga dan Banyumas, sudah sering terjadi dalam sejarah. Pada awal abad ke-18, ada dua orang keturunan Banyumas (Dipayuda I dan Dipayuda II) yang menjadi pejabat Ngabehi Pamerden (cikal-bakal Purbalingga) dihapuskan dari daftar pejabat Pra-Purbalingga karena faktor persaingan politik dan tidak senang dari keturunan Arsantaka yang telah mengalami mobilitas sosial (Dipayuda III) kepada keturunan Banyumas, bahkan keturunan Banyumas yang kemudian menjadi Bupati Banjarnegara pertama tahun 1831, Dipayuda IV menyatakan tabu nikah juga terhadap keturunan Dipayuda Purbalingga karena permainan ilmu hitam. Pada akhir abad ke-18, juga ada dua orang pejabat Ngabehi Purbalingga, yaitu Yudakusuma I (anak RT Yudanegara IV, bupati Banyumas) dan Yudakusuma II (anak RT Yudanegara V, bupati Banyumas) yang diolok-olok sebagai pembunuh selir dan orang yang menderita sakit jiwa.

Tampaknya persaingan politik di Purbalingga antara keturunan Arsantaka dengan keturunan Banyumas ditonjolkan menjadi masalah yang menimbulkan tabu nikah. Namun, pada teks yang terkandung dalam naskah dan folklor secara samar-samar ada hubungan kekerabatan antara pihak Purbalingga dengan Sokaraja. Hubungan kekerabatan tidak harus merupakan satu jalur keturunan, tetapi bisa juga melalui hubungan perkawinan. Arsantaka adalah seorang demang bawahan RT Yudanegara III. Anaknya yang bernama Arsayuda dijadikan menantu oleh Yudanegara III, bahkan di kemudian hari menjadi bupati Purbalingga dengan gelar Dipayuda III. Jadi, tabu nikah antara Sokaraja dengan Purbalingga merupakan larangan perkawinan incest untuk menikahi wanita yang berasal dari klen yang sama (Bertens 1991: xxxiv).

Ada tiga konsep yang dipakai untuk menjelaskan fenomena tabu nikah, yaitu *cosmos*, *chaos*, dan *liminal*. *Cosmos dan chaos merupakan dua hal yang berpasangan, tetapi saling bertentangan (binary opposition)*. Sementara itu, konsep liminal adalah konsep yang muncul di antara *cosmos* dan *chaos*. Konsep *cosmos* dan *chaos* ini terkait dengan konsep mitos penciptaan dari yang tidak wujud menuju yang berwujud. Atau menurut bahasa kosmologis, dari *chaos* (kekacauan) menuju *cosmos* (keteraturan) (Eliade 2002b: 18-19). *Chaos* merupakan sesuatu yang asing dan berada di luar dunia manusia atau dunia lain yang kacau, tidak teratur, dan tidak berbentuk, sedangkan *cosmos* adalah dunia manusia yang penuh dengan keteraturan sehingga transformasi dari *chaos* menuju *cosmos* oleh tindakan penciptaan Ilahi (Eliade 2002a: 23-25) merupakan dambaan manusia sepanjang zaman. Namun, proses penciptaan kembali itu tidak selalu terjadi dengan cepat atau seketika, tetapi memasuki tahap liminal. Suatu tahap yang sering diartikan sebagai tahap peralihan atau transisi, yang bersifat ambigu karena subjek ritual berkedudukan *tidak di sana dan juga tidak di sini* (Winangun 1990: 31). Tabu nikah adalah situasi pasca-*chaos* yang tidak bergerak ke *cosmos*, atau dengan kata lain tidak *chaos* dan tidak *cosmos* sebagaimana teori liminal yang dikembangkan Victor Turner. Pada tahap liminal, manusia yang menganut tabu nikah mengalami keadaan ketidakberbedaan atau sesuatu yang lain, atau pengalaman antistruktur. Posisi ambang atau liminal memungkinkan manusia melakukan refleksi formatif, yaitu perenungan dan pembentukan diri (Winangun 1990: 41).

Penelitian ini memakai naskah sebagai objek kajian sehingga ditempuh metode filologi (Sulastin-Sutrisno 1994: 65). Ada enam langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian filologi, yaitu (1) inventarisasi naskah, (2) deskripsi naskah, (3) perbandingan teks, (4) dasar-dasar penentuan naskah yang akan ditransliterasi, (5) singkatan teks, dan (6) transliterasi naskah (Djamaris 1977: 23-24). Enam langkah tersebut merupakan kerja filologi yang harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan analisis teks.

Langkah pertama berusaha mengumpulkan naskah, khususnya yang telah tersimpan pada koleksi lokal (Purbalingga dan Banyumas). Langkah kedua, peneliti melakukan deskripsi naskah, yaitu merinci keadaan fisik naskah, misalnya

keadaan naskah, kertas, watermark, catatan tentang isi naskah, dan pokok-pokok isi naskah. Langkah ini sangat membantu untuk mengidentifikasi naskah sehingga keunikan naskah dan isinya. Selanjutnya, pada *langkah ketiga, peneliti melakukan perbandingan teks* agar diketahui pengelompokan isi naskahnya sehingga versi-versi dan variasi-variasi teksnya dapat dikenali sedini mungkin oleh peneliti. Langkah ini sebenarnya merupakan langkah yang penting karena peneliti sudah mulai melakukan kritik teks. Artinya, ia sudah mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing teks. *Langkah keempat menentukan naskah-naskah yang akan ditransliterasi*. Karena tujuan pertama penelitian ini untuk menyediakan data, maka semua naskah yang memakai huruf Jawa harus ditransliterasi agar siap sebagai sumber. Kemudian, pada *langkah kelima, peneliti meringkas isi naskah* agar dapat diketahui dengan cepat teksnya. Akhirnya, pada *langkah keenam, semua naskah yang berhuruf Jawa ditransliterasikan ke dalam huruf Latin* agar mempermudah pembacaan teksnya sehingga siap dipakai sebagai sumber dalam melakukan kritik teks.

Kritik teks (kritik intern) ditempuh dengan cara membandingkan antara sumber satu dengan sumber lain mengenai fakta sejarah naskah-naskah lama (Ikram 1997: 30; bdk. Kartodirdjo 1982: 22 & Djajadiningrat 1995: 58-66). Perbedaan teks merupakan kesaksian yang unik. Dalam rangka penyusunan sejarah intelektual, maka perbedaan teks di samping sebagai kesaksian yang unik tadi, juga sebagai bentuk penafsiran, bahkan mungkin penafsiran dari penafsiran. Maka dari itu, sikap kritis terhadap perbedaan tersebut selalu diperhatikan. Penelitian filologi senantiasa memberikan sumbangan data bagi ilmu sejarah dalam rangka penulisan sejarah intelektual di tingkat lokal.

Di samping naskah, dalam penelitian ini juga digunakan data yang berbentuk folklor dengan menerapkan metode pengumpulan folklor yang dikembangkan oleh Danandjaja (1985: 1-21). Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pewaris aktif folklor yang didapat melalui seorang informan kunci yang kemudian akan menunjuk informan-informan kunci lainnya sehingga bagaikan bola salju, lama-kelamaan peneliti dapat menemukan para pewaris aktif dalam jumlah yang banyak. Setelah para pewaris aktif ditemukan, maka dilakukan wawancara dengan dua cara, yaitu wawancara tidak terarah dan wawancara terarah (Danandjaja 1984: 187). Wawancara tidak terarah adalah wawancara yang bersifat bebas dan santai dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada pewaris aktif untuk memberikan keterangan yang ditanyakan agar peneliti mendapat gambaran umum bentuk folklor yang akan diteliti. Hasil wawancara tidak terarah ditindaklanjuti dengan wawancara terarah. Artinya, daftar pertanyaan yang diajukan peneliti sudah terfokus. Ketika wawancara, peneliti harus mencatat identitas pewaris aktif yang terdiri dari nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, suku bangsa, tempat lahir, bahasa yang dikuasai, tempat wawancara, dan tanggal wawancara (Danandjaja 1984: 217). Selain itu, catatan lapangan (*field notes*) atau rekaman tape recorder yang berupa hasil wawancara harus ditranskripsikan agar mempermudah kerja peneliti selanjutnya.

Kritik terhadap sumber-sumber folklor ditempuh dengan melakukan penentuan ciri-ciri umum atau sistem, yakni metode komparatif dengan cara mengklasifikasikan folklor yang telah dikumpulkan (Koentjaraningrat 1985: 45). Seorang ahli folklor dari Amerika Serikat, Jan Harold Brunvand telah membagi folklor menjadi tiga bagian, yaitu (1) folklor lisan, (2) folklor sebagian lisan, dan (3) folklor bukan lisan (Danandjaja 1984: 21). Tampaknya bahan penelitian ini lebih cenderung berbentuk folklor lisan yang meliputi (a) bahasa rakyat, (b) ungkapan tradisional, (c) pertanyaan tradisional, (d) puisi rakyat, (e) cerita prosa rakyat, dan (f) nyanyian rakyat. Namun, folklor lisan yang terfokus pada tabu nikah terdapat pada cerita prosa rakyat. Kemudian, untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan pengecekan keterangan setiap pewaris aktif kepada pewaris aktif lain tentang folklor lisan yang telah dikumpulkan itu, dengan memberi daftar pertanyaan yang sama kepada pewaris aktif lain. Atau, peneliti melakukan pengecekan itu berdasarkan pengamatannya sendiri terhadap keterangan para pewaris aktif. Dengan demikian, kredibilitas keterangan pewaris aktif dapat dipertanggungjawabkan mutunya (Danandjaja 1984: 188) sehingga diperoleh fakta-fakta.

PEMBAHASAN

Pada penelitian yang terdahulu, terdapat kasus tabu nikah di kalangan warga masyarakat desa Banjarnayar (sekarang kecamatan Sokaraja, Banyumas) di satu pihak dengan warga desa Sambeng Kulon, Sambeng Wetan, dan Kramat (kecamatan Kembaran, Banyumas), Jompo Kulon (kecamatan Sokaraja, Banyumas), serta Jompo Wetan (sekarang kecamatan Kalimanah, Purbalingga) di pihak lain sebagai akibat konflik antarelite perdesaan pada masa lampau yang terjadi di daerah perbatasan dua kabupaten, yaitu Banyumas dan Purbalingga (Priyadi 2006). Kasus tersebut juga dijumpai pada kasus tabu nikah antarelite kabupaten, yaitu Purbalingga dan Sokaraja (sekarang kecamatan dalam kabupaten Banyumas) seperti terkandung dalam teks *Babad Purbalingga-Sokaraja atau dua versi folklornya*.

Di sini, ada dua folklor yang dipakai, yaitu *Cerita Raden Kaligenteng dan Babad Purbalingga Sokaraja versi Kutasari*. Di samping itu, ada dua naskah, yakni *Babad Sokaraja Versi Hilal* dan *Babad Purbalingga-Sokaraja Versi Kalimanah*. Berdasarkan kajian terhadap teksnya, dua versi folklor di atas pada intinya sama dengan Babad Sokaraja Versi Hilal. Jadi, dua versi folklor dan satu naskah tadi mewakili gambaran Sokaraja. Atau dengan kata lain ketiganya memihak kepada Sokaraja sehingga ketiganya itu bisa dikatakan sebagai versi Sokaraja, sedangkan Babad Purbalingga-Sokaraja Versi Kalimanah menunjukkan versi Purbalingga. Jadi, ada tiga dibanding satu kesaksian masa lampau di antara kasus tabu nikah Purbalingga dan Sokaraja. Versi Sokaraja menjelaskan bahwa Adipati Jebugkusuma dan Adipati Kertabangsa terhitung masih bersaudara dan satu guru, yakni Ki Ageng Ngorean atau Ki Gede Ngurean, atau Mbah Kendal Bolong. Versi Purbalingga tidak menjelaskan hubungan kekeluargaan seperti halnya Versi

Sokaraja, bahkan ada semacam pemisahan yang begitu mutlak bahwa bupati Sokaraja Panolih Sukarjo adalah putra Bupati Banyumas, sedangkan bupati Purbalingga adalah putra Ki Ageng Pekandhangan yang bernama Baribin Wironoto. Di sini, tokoh Baribin yang tidak ada kaitan genealogis diklaim sebagai nenek moyang bupati Purbalingga. Padahal, tokoh tersebut selalu disebut dalam teks Babad Banyumas beserta versi-versinya sebagai nenek moyang para bupati Banyumas melalui Adipati Wirasaba, Raden Kaduhu dan Warga Utama II.

Wirasaba dalam teks-teks Babad Banyumas lebih memiliki hubungan genealogis dan psikologis dengan Banyumas daripada Purbalingga. Purbalingga terasing dari pusat-pusat leluhur yang ada di Purbalingga. Masyarakat Purbalingga dewasa ini menyatakan bahwa ada tiga acuan sejarah yang dianggap sebagai tonggak-tonggak penting masa lampau Purbalingga, yaitu Onje, Ardi Lawet, dan Purbalingga. Namun, pada masa lalu, ketiga pusat tadi tidak memiliki hubungan genealogis yang jelas dengan penguasa Purbalingga. Klaim yang dilakukan Purbalingga berdasarkan teks versi Kalimanah itu berusaha menggeser kedudukan Sokaraja dan melegitimasi kedudukan Purbalingga sehingga Purbalingga nanti layak menang melawan Sokaraja dengan memutus tali hubungan kekerabatan antara Baribin dengan bupati Banyumas. Sebaliknya versi Kalimanah itu mencoba menyambung tali kekerabatan yang baru antara Purbalingga dengan tokoh legendaris Baribin yang berasal dari Majapahit. Kiranya Purbalingga melakukan oposisi terhadap Banyumas dengan pengakuan sepihak Purbalingga yang bertentangan dengan teks-teks Babad Banyumas.

Teks Kalimanah tersebut tampaknya telah mendekonstruksi teks-teks Babad Banyumas yang telah mengklaim Wirasaba sebagai leluhurnya sehingga pihak Purbalingga kehilangan acuan silsilah atau padanan nenek moyang. Teks Kalimanah sesungguhnya menunjukkan fenomena kebingungan sejarah yang dihadapi masyarakat Purbalingga dalam persaingannya dengan penguasa lokal lainnya, termasuk di antaranya Sokaraja. Sokaraja yang disebut oleh teks Kalimanah sebagai kepanjangan tangan dari keturunan Banyumas diposisikan sebagai pihak yang kalah dalam persaingan itu sehingga Sokaraja harus terhapus statusnya sebagai kabupaten dan masuk sebagai bagian wilayah Purbalingga. Selanjutnya, tentang hubungan antara Purbalingga dengan Sokaraja digambarkan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabu Nikah antara Masyarakat Purbalingga dengan Sokaraja (Sugeng Priyadi)

Tabel 1. Hubungan Purbalingga dan Sokaraja

No.	Teks	Cerita Raden Kaligenteng	Babad Sokaraja Versi Hilal	Babad Purbalingga Sokaraja Versi Kutasari	Babad Purbalingga Sokaraja Versi Kalimanah
1.	Pembangun Purbalingga	--	--	---	Purbasena Linggasena
2.	Asal-mula Nama Sokaraja	Sukaraja	Sokaraja	Sokaraja (Kutasari), nama kuda Jebugkusuma	Sokaraja (putra Adipati Tirta Kencana)
3.	Nama Bupati Purbalingga	--	Kertabangsa	Kertabangsa	Purboyo Wirokusumo
4.	Nama Bupati Sokaraja	Jebugkusuma	Jebugkusuma	Jebugkusuma	Panolih Sukarjo
5.	Guru Bupati Purbalingga Sokaraja	Ki Ageng Ngorean (Kendal Bolong)	Ki Gede Ngorean (Kendang Bolong)	Mbah Kendal Bolong	Ki Ageng Pekandhangan Baribin Wironoto (Guru bupati Purbalingga)
6.	Hubungan Purbalingga Kertanegara	--	--	--	Konflik, Kertanegara kalah dan bergabung dengan Purbalingga

Kondisi *chaos Sokaraja* memang diakui oleh teks versi Sokaraja setelah berakhirnya konflik sosial yang melibatkan Purbalingga dan Sokaraja meskipun versi Sokaraja itu cenderung berpihak kepada Sokaraja daripada Purbalingga. Sebelum berbicara mengenai kechaosan Sokaraja perlu dibahas proses menuju peristiwa *chaos tadi*. Maka dari itu, perlu dicermati tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Kaligenteng dan Raden Kuncung

No.	Teks	Raden Kaligenteng	Babad Sokaraja Versi Hilal	Babad Purbalingga Sokaraja Versi Kutasari	Babad Purbalingga Sokaraja Versi Kalimanah
1.	Anak bupati Purbalingga	Kaligenteng	Kaligenteng	Kaligenting	Purboyosiwi (Kaligenteng)
2.	Anak bupati Sokaraja	Raden Kuncung	Raden Kuncung	Raden Kuncung	Raden Kuncung
3.	Pusaka	Kiai Setan Kober	Brongos Setan Kober	Brongot Setan Kober	Tombak Narasoma
4.	Fungsi Pusaka	Kekuasaan	Kekuasaan	Kekuasaan	Tumbal Banjir
5.	Lakon Pentas	Babad Purbalingga Sokaraja	Babad Sokaraja Purbalingga	Babad Purbalingga	Perang Purbalingga Sokaraja
6.	Dalang	Dalang Jemblung, Dalang Merta Kanda (Kuncung)	Dalang Wicara Sandi, Dalang Maca Kanda (Kuncung)	Dalang Jemblung Marta Kanda (Kuncung)	Dalang Purwocarito (Kaligenteng)
7.	Watak Kaligenteng	Buruk (berangasan, tidak patuh kepada orang tua)	Buruk (mabok, madon, judi)	Buruk	Baik (gemar mencari ilmu dan bertapa)
8.	Watak Raden Kuncung	Baik	Baik	Baik	Buruk (suka berfoya-foya dan berpesta)
9.	Nasib Kaligenteng	Menjadi ular besar	Menjadi ular naga (disuruh bertapa di Gunung Si Kasur oleh ayahnya)	Menjadi ular (disuruh bertapa di lereng Gunung Slamet, Gunung Cliring oleh ayahnya)	Kaligenteng menang atas Raden Kuncung

Versi Sokaraja menceritakan bahwa Raden Kaligenteng akan diangkat sebagai bupati di Purbalingga untuk menggantikan ayahnya. Salah satu syarat untuk itu diperlukan legitimasi berupa keris sebagai simbol pewarisan (Atmaksumah 1982: 37) sehingga keris yang disebut Brongos Setan Kober atau Brongot Setan Kober merupakan simbol kekuasaan yang berfungsi untuk menjelaskan bahwa keris tersebut adalah pemimpin yang bersatu dengan rakyatnya (Moertono 1985: 25-26). Agaknya keris itu menjadi motif konflik yang

terjadi secara berlarut-larut dari konflik Raden Kaligenteng dengan guru ayahnya, konflik Kaligenteng dengan pamannya, dan konflik Kaligenteng dengan Raden Kuncung. Raden Kaligenteng diidentifikasi sebagai seorang yang berwatak buruk, seperti berangasan, tidak patuh kepada orang tua, mabok-mabokan, main perempuan, dan main judi. Cap negatif diberikan oleh versi Sokaraja agar Raden Kaligenteng itu bukanlah orang yang pantas untuk menggantikan ayahnya sebagai adipati di Purbalingga. Sebaliknya, dengan Raden Kuncung yang selalu dilukiskan sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan gemar mencari ilmu dinilai layak menjadi seorang pemimpin. Konflik Kaligenteng melawan Raden Kuncung menunjukkan bahwa Kaligenteng sudah selayaknya disingkirkan karena versi Sokaraja selalu menyatakan bahwa Kaligenteng telah berubah menjadi ular besar atau naga yang harus mencari pengampunan dengan bertapa. Nasib Kaligenteng digambarkan tragis karena ia terusir dari Purbalingga. Ia diwajibkan bertapa oleh ayahnya di Gunung Si Kasur atau Gunung Slamet (lerengnya adalah Gunung Cliring). Wajib bertapa itu tidak lebih suatu upaya penyingkiran dari dunia ramai atau lingkaran kekuasaan.

Versi Sokaraja juga menunjukkan bahwa Raden Kuncung adalah seorang yang lebih terpelajar daripada Kaligenteng karena putra bupati Sokaraja itu mampu menjadi seorang dalang jemblung dengan nama yang bervariasi, yaitu Dalang Merta Kanda, Dalang Wicara Sandi, atau Dalang Maca Kanda. Dalang adalah salah satu juru bicara masyarakat pada masa lampau yang sangat berwibawa mengenai kebudayaannya seperti halnya para pengarang karya sastra. Dalang termasuk manusia yang jenius dan kreatif (bdk. Teeuw 1988: 156) karena ia mampu menuturkan perihal budaya yang dalam konteks versi Sokaraja adalah kesenian dalang jemblung yang melakonkan bukan wayang jemblung khas Banyumasan (cerita Umarmaya-Umarmadi) itu sendiri (Koderi 1991: 45-50) atau cerita wayang pada umumnya (epos Ramayana-Mahabharata), tetapi lakon khusus lokal, yaitu berjudul *Babad Purbalingga-Sokaraja*, atau *Babad Sokaraja-Purbalingga*, atau *Babad Purbalingga*. Penamaan teks lakon itu menurut versi Sokaraja memang tidak konsisten. Di satu sisi Purbalingga didahulukan, tetapi di sisi lain Sokaraja yang disebut lebih dahulu, atau hanya disebut Purbalingga saja.

Jika versi Sokaraja mengagung-agungkan Raden Kuncung, maka versi Purbalingga sebaliknya. Raden Kaligenteng adalah putra bupati Purbalingga yang berkarakter dan berperilaku yang serba positif. Ia adalah anak yang berbakti kepada orang tua dan gemar mencari ilmu hingga ke Ardi Lawet, serta memiliki jiwa kepahlawanan yang menonjol seperti yang ditunjukkan pada kasus jatuhnya Kabupaten Kertanegara dan Kabupaten Sokaraja. Oleh karena itu, ketika versi Purbalingga menonjolkan Raden Kaligenteng sebagai dalang yang bernama Dalang Purwocarito, maka teks lakon tidak menyebut teks babad seperti halnya versi Sokaraja, tetapi teks *Perang Purbalingga-Sokaraja*. *Pusaka* yang diperebutkan antara Sokaraja dengan Purbalingga tidak lagi Setan Kober, tetapi tombak Narasoma. Setan Kober menyimbolkan perilaku Aria Penangsang yang berangasan dan dipersalahkan dalam sejarah (De Graaf 1985: 25) yang

diidentifikasi dengan Raden Kaligenteng oleh versi Sokaraja. Jadi, Setan Kober bagi orang Purbalingga bukanlah pusaka yang cocok untuk ditonjolkan sehingga nama Setan Kober digantikan dengan nama yang lebih bersifat Purbalingga, yaitu Narasoma. Nama Narasoma adalah nama yang sangat akrab di telinga orang Purbalingga karena makamnya ada di kota itu. Meskipun Narasoma adalah tokoh wayang dalam siklus Mahabharata yang diragukan sikap keksatriannya (Magnis-Suseno 1988: 161; Anderson 2000: 16; Sumantri & Walujo 1999: 127), tetapi ia juga dikenal oleh orang Purbalingga sebagai tokoh legendaris demang Timbang di desa Penambongan pada masa lampau. Tombak itulah yang menghabisi Panolih Sukarjo, bupati Sokaraja. Tombak itu akan direbut oleh Sokaraja karena senjata itu dipakai sebagai alat tumbal banjir sesuai dengan ramalan bupati Banyumas.

Musuh Raden Kaligenteng yang bernama Raden Kuncung ditokohkan seperti Raden Kaligenteng menurut versi Sokaraja. Di sini, ada penjelasan yang bersifat kontradiksi atau kontroversi. Penjelasan seperti itu memang tampaknya tidak memuaskan seolah-olah bahwa karakter manusia itu dengan mudah dibalik-balik sesuai dengan selera si juru bicara dari masing-masing masyarakat yang menghasilkan teks babad atau folklor. Begitu pula dengan peristiwa kekalahan tragis Raden Kaligenteng atas Raden Kuncung yang selalu digambarkan dengan ular besar atau naga akan dibalik menjadi Raden Kuncung kalah secara total dan lari dari Sokaraja ke tempat yang sangat jauh, yaitu memasuki daerah budaya lain, yaitu Sunda. Kiranya, karena banyaknya orang atau warga masyarakat Banyumas yang tersingkir atau ditransmigrasikan ke Jawa Barat oleh para penulis babad di Banyumas, peristiwa itu dijadikan model bahwa semua orang yang tersingkir selalu dikaitkan dengan Sunda (bdk. Wiriadmadja 2002: 13).

Penyimbolan ular besar dan naga adalah simbol yang cenderung negatif dalam kerangka semiotik manusia Jawa. Hal itu tidak dilakukan oleh versi Purbalingga. Versi Purbalingga menceritakan nasib Raden Kuncung sebagai seorang pelarian yang menyedihkan karena harus pergi atau tergusur dari daerah kelahirannya. Seorang pelarian secara semiotik memang juga bernilai negatif karena di dalamnya terkandung unsur rasa takut. Artinya, Raden Kuncung itu bukanlah lelaki sejati karena ia melarikan diri dari kenyataan. Nasib ini sebenarnya sama tragisnya dengan Raden Kaligenteng. Namun, alasan disuruh atau diwajibkan bertapa itu lebih baik daripada nasib seorang pelarian. Bertapa merupakan aktivitas yang lebih baik karena tujuan akhir yang hendak dicapai adalah kesempurnaan hidup. Di situ, ada unsur penyesalan dan pertobatan agar kehidupan yang akan datang akan jauh lebih baik, sedangkan seorang pelarian mungkin membawa perasaan emosi yang meledak-ledak dan dendam kesumat terhadap musuh yang telah menggusurnya.

Penuturan versi Sokaraja dan versi Purbalingga yang berbeda merupakan suatu gejala yang amat wajar dan secara pasti sering dijumpai dalam persoalan konflik di antara dua kubu. Masing-masing kubu berusaha melakukan upaya pembenaran atas sikap dan perilakunya. Masing-masing mengaku paling benar sendiri, sedangkan lawannya adalah pihak yang salah, jelek, jahat, tidak

Tabu Nikah antara Masyarakat Purbalingga dengan Sokaraja (Sugeng Priyadi)

bermoral, atau penilaian negatif lainnya. Adanya perang legitimasi pada teks-teks tradisional yang diciptakan oleh masyarakat pendukungnya pada masa lampau menunjukkan kentalnya fenomena konflik sosial atau perbedaan pendapat yang meruncing di kalangan elite tradisional yang masing-masing ingin lebih menonjol daripada yang lain. Perang legitimasi merupakan gambaran umum dari masyarakat yang mempunyai perbedaan kepentingan.

Tabel 3 berikut ini mendeskripsikan hubungan konflik antara Adipati Kertabangsa dengan Adipati Jebugkusuma yang berakhir dengan lahirnya tabu nikah keturunan Sokaraja dengan Purbalingga. Ada dua versi yang menyatakan bahwa konflik itu berakhir dengan damai, tetapi ada dua versi pula yang mengakhiri konflik dengan konflik. Versi damai pun seperti termuat pada versi Kutasari juga berbau konflik, bahkan konflik yang berkepanjangan karena tabu nikah adalah konflik sosial yang berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat diketahui kapan akan berakhir, sementara masyarakat sekarang tidak lagi memahami konteks peristiwa yang telah melatarbelakanginya. Mereka menjadi korban dari konflik orang-orang terdahulu.

Tabel 3. Hubungan Kertabangsa dan Jebugkusuma

No.	Teks	Raden Kaligenteng	Babad Sokaraja Versi Hilal	Babad Purbalingga Sokaraja Versi Kutasari	Babad Purbalingga Sokaraja Versi Kalimanah
1.	Hubungan Jebugkusuma dengan bupati Purbalingga	1.Konflik 2.Jebugkusuma dan bupati Purbalingga tewas dalam pertempuran (mati sampyuh) 3.Timbul Pusaka Sokaraja Tombak Umbul Waringin	1.Damai 2.Raden Kuncung menjadi Adipati Kertabangsa II 3.Bendera Umbul Waringin dan Brongos Setan Kober bersatu di Purbalingga 4.Sokaraja menjadi wilayah Purbalingga 5.Kertabangsa I mandita, Jebugkusuma menjadi Panewu (wedana)	1.Damai 2.Muncul Pantangan Sokaraja Purbalingga tidak boleh berbesanan 3.Tabu dinyatakan oleh Adipati Jebugkusuma	1.Konflik 2.Adipati Panoli Sukarjo tewas di tangan Adipati Purboyo Wirokusumo 3.Prajurit Sokaraja kalah 4.Raden Kuncung kalah dan lari ke desa Dangan (Jawa Barat) 5.Sokaraja dihapus dan berakhir

Tabel 3 di atas menjelaskan situasi *chaos* yang dialami oleh, baik Purbalingga maupun Sokaraja. Di sini, ada empat situasi *chaos* sesuai dengan empat versi. *Versi pertama menerangkan situasi chaos yang tidak berujung yang diawali dengan konflik-konflik sebelumnya dan diakhiri dengan konflik Jebugkusuma dengan bupati Purbalingga. Nasib mereka sama, yakni tewas dalam pertempuran. Mereka mukswa, tetapi eksistensi mereka digantikan dengan kehadiran pusaka atau tombak Umbul Waringin. Nasib Sokaraja dan Purbalingga tidak ada kejelasan (chaos). Nasib Kaligenteng dan Raden Kuncung juga tidak berbeda. Jadi, Purbalingga dan Sokaraja sama-sama berada pada posisi chaos, yang eksis adalah tombak Umbul Waringin. Tombak Sokaraja itu adalah cosmos baru yang terbentuk dari mukswanya dua orang bupati yang terlibat konflik.*

Versi kedua pada hakikatnya juga sama meskipun konflik itu berakhir dengan damai. Perdamaian itu bagi pihak Sokaraja tampaknya menguntungkan karena kedudukan bupati Purbalingga diserahkan kepada Raden Kuncung dengan gelar Adipati Kertabangsa II. Kertabangsa I pergi dari Purbalingga menjadi pandita yang juga bertapa seperti Raden Kaligenteng. Berarti anak-beranak Kertabangsa I dan Raden Kaligenteng terusir dari kekuasaannya di Purbalingga. Dua pusaka penting dikuasai oleh Raden Kuncung. Raden Kuncung berpindah ke Purbalingga sehingga Sokaraja pun mengalami chaos karena ia harus dihapus eksistensi kabupatennya. Sang ayah, yaitu Adipati Jebugkusuma juga mengalami hal yang sama karena ia harus mendekonstruksi dirinya sebagai bupati Sokaraja dan hanya berkedudukan sebagai panewu atau wedana. Jadi, Purbalingga dan Sokaraja juga berada pada posisi chaos. Raden Kuncung menjadi bupati di tempat yang bukan seharusnya, atau Purbalingga berada di bawah kekuasaan orang yang tidak berhak. Eksistensi Raden Kuncung dan Purbalingga tetap berlanjut (cosmos), tetapi selalu chaos.

Versi ketiga menerangkan adanya perdamaian antara Sokaraja dengan Purbalingga. Namun, perdamaian itu diiringi dengan tabu nikah. Tabu nikah secara hakiki adalah kepanjangan konflik sosial dari kedua belah pihak pada masa lampau dan tidak berkesudahan atau chaos yang tidak pernah berakhir. Jadi, versi ketiga menonjolkan adanya perdamaian, tetapi senantiasa chaos. Situasi chaos itu masih dihadapi oleh masyarakat dewasa ini dan yang akan datang karena mereka tidak berani melanggar tabu nikah tersebut. Pelanggaran terhadap tabu diyakini oleh masyarakat kedua belah pihak dapat berakibat pada kehidupan yang serba tidak harmonis (disharmoni), baik pada pasangan pengantin itu sendiri maupun keluarga pengantin pria dan perempuan. Akibat buruk yang ditimbulkan menjadi semacam memori kolektif pada kedua warga masyarakat yang terlibat tabu tersebut untuk sekali-kali tidak melanggarnya.

Versi keempat menjelaskan konflik yang diakhiri dengan didekonstruksinya Sokaraja. Tidak hanya itu saja, Adipati Panolih Sukarjo dari Sokaraja dan putranya yang bernama Raden Kuncung pun terdekonstruksi oleh teks Kalimanah. Versi keempat ini tampaknya merupakan gambaran yang terburuk yang dialami oleh pihak Sokaraja. Pada versi kedua, Adipati Kertabangsa I dan

Raden Kaligenteng menjadi pihak yang terdekonstruksi, tetapi Purbalingga tetap eksis sehingga Purbalingga masih lebih baik nasibnya daripada Sokaraja karena Sokaraja pada versi keempat terdekonstruksi secara total.

Gejala tabu nikah yang dinyatakan oleh versi keempat memang didukung oleh folklor Sokaraja. Folklor tersebut melukiskan bahwa awal-mula munculnya tabu nikah antara Sokaraja dengan Purbalingga diwarnai oleh peristiwa lamaran seorang bangsawan Sokaraja terhadap putri Purbalingga. Pihak Purbalingga akan menerima lamaran pihak Sokaraja dengan syarat membawa *tumpeng uceng*. Tumpeng tersebut adalah tumpeng yang seluruhnya dibuat dengan bahan *uceng*, yaitu sejenis ikan sungai yang agak langka populasinya. Pembuatan tumpeng uceng memerlukan banyak ikan sungai jenis tersebut. Syarat tersebut bagi pihak Sokaraja merupakan syarat yang terlalu memberatkan atau dengan kata lain merupakan suatu penolakan yang halus sehingga muncul *wewaler atau tabu* antara orang Sokaraja dengan Purbalingga. Tabu tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak boleh berbesanan. Sebaliknya, dari peristiwa ini muncul syarat tumpeng berisi *uceng dalam tradisi lamaran pada kalangan masyarakat Sokaraja sendiri yang tidak terkait dengan lamaran kepada pihak Purbalingga*. Tumpeng berisi *uceng kemungkinan adalah tafsiran yang keliru dari orang Sokaraja terhadap tumpeng uceng yang menimbulkan tabu berbesanan antara Sokaraja dengan Purbalingga yang sampai hari ini masih berlaku*.

Deskripsi latar belakang sosial budaya lokasi penelitian, yaitu Purbalingga dan Sokaraja ini menunjukkan bahwa peristiwa tabu nikah yang masih berlaku pada masyarakat pendukungnya hingga dewasa ini merupakan situasi *chaos* (ketidaktentuan, ketidakteraturan, atau gagasan yang tidak koheren dan tanpa bentuk) yang diciptakan untuk mendekonstruksi situasi *cosmos* (*kemapanan, keteraturan, atau keserasian*) (Bakker 1995: 39-40; Cassirer 1987: 109; bdk. Susanto 1987: 46) yang diakibatkan oleh konflik-konflik sosial yang terjadi pada masa lalu dan melibatkan orang-orang masa kini. Telah terjadi arus balik karena orang selalu berpikir bahwa *chaos pasti berakhir dan dimulailah dengan cosmos* yang baru. Tabu nikah justru merupakan pergeseran dari *cosmos menuju chaos* yang memanjang dalam waktu hingga masa kini sepanjang masyarakat masih menganggap bahwa tabu tersebut masih berlaku. Tabu nikah bagi masyarakat yang mempercayainya adalah *chaos yang tidak pernah berakhir dan kedua masyarakat tersebut berada pada posisi ambang atau liminal sehingga cosmos baru tidak muncul, kecuali tabu nikah tersebut ditinggalkan*.

KESIMPULAN

Kasus tabu nikah Sokaraja-Purbalingga termuat pada teks Babad Purbalingga-Sokaraja versi Sokaraja dan Babad Purbalingga-Sokaraja versi Kalimanah. Kedua versi melakukan perang legitimasi sebagai gejala persaingan dan konflik di antara dua kubu. Perang legitimasi ini menggambarkan kehebatan mereka masing-masing. Tabu nikah yang muncul di antara Sokaraja dengan Purbalingga disebabkan oleh konflik sosial dan persaingan di antara mereka. Pada

hakikatnya, seluruh kasus tabu nikah yang muncul pada masyarakat perdesaan di Purbalingga dan Sokaraja menunjukkan fenomena pergeseran dari *cosmos* menuju *chaos*, tetapi tidak bergerak kembali menuju *cosmos* yang baru. Pergeseran itu menempatkan, baik pihak Sokaraja maupun Purbalingga pada posisi ambang. Artinya, situasi *chaos* tidak mengalami transformasi dari *chaos* menuju *cosmos* yang baru. Pada kasus tabu nikah antara Sokaraja dengan Purbalingga yang menjadi *troublemaker* (biang kerok) adalah Raden Kaligenteng. Tokoh ini selalu menciptakan konflik-konflik yang memperuncing hubungan antara Sokaraja dengan Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R.O'G. 2000. *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa*. Yogyakarta: Qalam.
- Atmakusumah. 1982. *Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia.
- Bakker, Anton. 1995. *Kosmologi & Ekologi: Filsafat tentang Kosmos sebagai Rumah Tangga Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, K. 1991. *Sigmund Freud Memperkenalkan Psikoanalisa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Brotodiredjo & Ngatidjo Darmosuwondo. 1969. *Inti Silsilah dan Sedjarah Banjumas*. Bogor: tanpa penerbit.
- Cassirer, Ernst. 1987. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei tentang Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Danandjaja, James. 1984. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Grafitipers.
- _____. 1985. "Mengumpulkan Folklore Bali Aga di Trunyan," dalam Koentjaraningrat & Donald D. Emmerson. *Aspek Manusia dalam Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Gramedia.
- De Graaf, H.J. 1985. *Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati*. Jakarta; Grafitipers.
- Djajadiningrat, Hoesein. 1995. "Tradisi Lokal dan Studi Sejarah Indonesia," dalam Soedjatmoko, Mohammad Ali, G.J.Resink, dan G.McT. Kahin. *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamaris, Edwar. 1977. "Filologi dan Cara Kerja Penelitian Filologi," dalam *Bahasa dan Sastra, Tahun III, Nomor 1*.
- Eliade, Mircea. 2002a. *Sakral dan Profan: Menyingkap Hakikat Agama*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

- ____. 2002b. *Mitos Gerak Kembali yang Abadi: Kosmos dan Sejarah*. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Ikram, Achadiati. 1997. *Filologia Nusantara*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Koderi, M. 1991. *Banyumas Wisata dan Budaya*. Purwokerto: Metro Jaya.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Magnis-Suseno, Franz. 1988. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Priyadi, Sugeng. 2006. "Konflik Sosial Tabu Nikah pada Masyarakat Perdesaan Purbalingga dan Banyumas," dalam *Humaniora, Volume 18, Nomor 2, Juni*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Soedarmadji. 1991. "Kangjeng Kalibogor," dalam *Buku Peringatan Sadranan*, edisi 10 Maret. Purwokerto: Yayasan Pesarean Dawuhan.
- Sulastin-Sutrisno, 1994. "Teori Filologi dan Penerapannya." dalam Siti Baroroh Baried, dkk. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: BPPF Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Sumantri, Barnas & Kanti Walujo. 1999. *Hikmah Abadi: Nilai-nilai Tradisional dalam Wayang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, Hary PS. 1987. *Mitos menurut Pemikiran Mircea Eliade*. Yogyakarta: Kanisius.
- Teeuw, A. 1988. *Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya-Girismukti Pasaka.
- Winangun, Y.W. Wartaya. 1990. *Masyarakat Bebas Struktur: Liminalitas dan Komunitas Menurut Victor Turner*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wiriadmadja, Rochiati. 2002. *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*. Bandung: Historia Utama Press.